



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PONCO HARTANTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA
TENGAH,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SRAGEN,



Dr. Ponco Hartanto, S.H., M.H.



Virginia Hariztavianne, S.H., B.Bus., M.M., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	80%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	71
		Nilai Kinerja Anggaran	90

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.466.830.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 15.429.095.000
	Jumlah	Rp 16.895.925.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Semarang, Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA
TENGAH,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SRAGEN,



Dr. Ponco Hartanto, S.H., M.H.



Virginia Haristyaningtyas, S.H., B.Bus., M.M., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDRA PURNAMAWATI, SH., MH.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

INDRA PURNAMAWATI, SH.,MH.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi	Persentase Pengelolaan Keuangan secara	Realisasi anggaran ----- x 100	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Anggaran Kejaksaan RI	Optimal	Jumlah pagu anggaran	
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	95
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional ----- x 100 Jumlah sarana dan prasarana	90%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Tinggi	71

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Umum	Rp. 30.000.000,00
2.	Layanan Perkantoran	Rp. 10.229.095.000,00
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 5.170.000.000,00
	Jumlah	Rp. 15.429.095.000,00

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,



VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M.,
M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

INDRA PURNAMAWATI, SH., MH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUJIB SYARIS, SH., MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

MUJIB SYARIS, SH., MH.

Pihak Kedua,



VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan	Persentase Kegiatan Pengamanan	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pembangunan Strategis	Pembangunan Strategis	----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	80%
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	80%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	90%

No	Kegiatan	Anggaran
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri		Rp. 118,008,000,00
1.	Kegiatan Operasi Intelijen di Bidang Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen di Kejaksaan Negeri	Rp. 40.000.000,00
2.	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri	Rp. 58.008.000,00
3.	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20.000.000,00
Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri		Rp. 91.376.000,00
4.	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri	Rp. 38.976.000,00
5.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri	Rp. 52.400.000,00

Sragen, Januari 2025,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN



MUJIB SYARIS, SH., MH.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN



VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M.,
M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUNTO TRIHATMOJO, SH.MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN



VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

KUNTO TRIHATMOJO, SH.MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
	Keadilan Restoratif		Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	85%
Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	85%	
Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi		Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	90%	

No	Kegiatan	Anggaran
	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	Rp 577.984.000,00
1.	Penanganan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri	Rp. 33.880.000,00
2.	Penanganan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Negeri	Rp. 488.840.000,00
3.	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri	Rp. 9.264.000,00

4.	Penanganan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi pada Kejaksaan Negeri	Rp. 46.000.000,00
----	---	-------------------

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN



VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

A black ink signature is written on the page.

KUNTO TRIHATMOJO, SH.MH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUDI SULISTYO, SH., MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN


VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.


BUDI SULISTYO, SH., MH.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada	75%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	pada Tahap Penyelidikan	tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100	80%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)	
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	$\frac{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi}}{\text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$	85%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan}} \times 100$	85%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}} \times 100$	80%
		Persentase Perkara Tindak	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai,	80%


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	<p>dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	

No	Kegiatan	Anggaran
	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari	Rp. 549.062.000,00
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Negeri	Rp. 92.082.000,00
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan Di Kejaksaan Negeri	Rp. 206.000.000,00
3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Di Kejaksaan Negeri	Rp. 239.900.000,00
4.	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Lainnya, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai Terpidana di tahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Negeri	Rp. 11.080.000,00

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN
 VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M.,
 M.H.

Pihak Pertama,
 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
 KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

 BUDI SULISTYO, SH., MH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RONI, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

RONI, S.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian	Persentase Perkara Perdata yang	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	75%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	75%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata ----- X 100 Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata	75%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	75

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Hukum dan Tindakan Hukum Lain			

No	Kegiatan	Anggaran
	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri	Rp. 80.400.000,00
1.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000,00
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000,00
3.	Pertimbangan Hukum yang Dilakukan di Kejaksaan Negeri	Rp. 13.200.000,00
4.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 24.000.000,00
5.	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Negeri	Rp. 6.000.000,00

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,



 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

VIRGINIA HARTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN

 KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN



 RONI, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIEF RYADI, SH., MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN
VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus., M.M., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI P3BR
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN


ARIEF RYADI, SH., MH.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p> Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang </p>	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya -----x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	

No	Kegiatan	Anggaran
Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan		Rp. 50.000.000,00
1.	Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 26,500,000,00
2.	Pemusnahan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 8.000.000,00
3.	Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 15.500.000,00

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,



 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
 SRAGEN

 VIRGINIA HARIZTAVIANNE, S.H., B.Bus.,
 M.M., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI P3BR
 KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

 ARIEF RYADI, SH.M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAVIDZ MABRURI, SE.
Jabatan : KEPALA URUSAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN PNBP PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA PURNAMAWATI, SH.,MH
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung Pihak Kedua mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian Pihak Kedua dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

INDRA PURNAMAWATI, SH.,MH.

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN TATA USAHA
KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN PNBP
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

HAVIDZ MABRURI, SE.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSSIE KUSUMASTUTI, SH.
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DASKRIMTI DAN PERPUSTAKAAN KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDRA PURNAMAWATI, SH.,MH
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung Pihak Kedua mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian Pihak Kedua dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

INDRA PURNAMAWATI, SH.,MH.

Pihak Pertama,

KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN,
DASKRIMTI DAN PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

YUSSIE KUSUMASTUTI, SH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Jabatan : KASUBSI EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAMANAN
PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUJIB SYARIS, SH.,MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung Pihak Kedua mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian Pihak Kedua dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGERI SRAGEN

MUJIB SYARIS, SH.,MH.

Pihak Pertama,

KASUBSI EKONOMI KEUANGAN DAN
PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

TRI AGUNG SANTOSO, SH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HASRI MARWINDA, SH.
Jabatan : KASUBSI PENUNTUTAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUNTO TRIHATMOJO, SH. MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mendukung Pihak Kedua mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian Pihak Kedua dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

KUNTO TRIHATMOJO, SH. MH

Pihak Pertama,

KASUBSI PENUNTUTAN PADA
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

HASRI MARWINDA, SH.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RYAN MAHARDIKA, SH., MH.
Jabatan : KASUBSI PENYIDIKAN PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI SULISTYO, SH.,MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mendukung Pihak Kedua mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian Pihak Kedua dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sragen, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN


BUDI SULISTYO, SH.,MH.

Pihak Pertama,

KASUBSI PENYIDIKAN
KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN


RYAN MAHARDIKA, SH., MH.